

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan seperti tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan bidang pertanahan di Kabupaten Bantul sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan bidang pertanahan menjadi urusan wajib di Kabupaten Bantul yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.
2. Kewenangan bidang pertanahan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul terbatas pada kewenangan bidang pertanahan yang bersifat lokalitas. Sedangkan kebijakan pertanahan secara regional dan nasional masih ditentukan dan dilaksanakan oleh pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan).
3. Dampak dari kebijakan pemerintah terkait dengan penyerahan kewenangan bidang pertanahan, bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul hanya melaksanakan kewenangan bidang pertanahan yang telah ditentukan bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka disarankan bagi Pemerintah Kabupaten Bantul untuk :

1. Memperkuat kedudukan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kewenangan di bidang pertanahan dan memberikan perhatian utama dalam pelaksanaan kewenangan tersebut di Kabupaten Bantul.
2. Menyusun regulasi baik Peraturan Daerah maupun peraturan Kepala Daerah sebagai peraturan pelaksanaan kewenangan di bidang pertanahan dengan mendasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan memperhatikan peraturan perundang-undangan lain di bidang pertanahan.
3. Menjalin kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan alih pengetahuan dalam bidang pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A Partanto, Pius dan M. Dahlan Al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Cetakan Pertama. Surabaya: Penerbit Arkola, 1994.
- Asshiddiqie, J. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Edisi Kesatu. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta, 2005.
- Bajeber, Zain. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, Komentar H. Zain Bajeber*. Jakarta : Forum Indonesia Maju, 2004.
- Busrizalti, H.M. *Hukum Pemda, Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta : Total Media, 2013.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta : Departemen Agama RI, 2004.
- Erwiningsih, Winahyu. *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Total Media, 2009.
- Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah.*, Bandung : Alumni, 2004.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan, Isi dan Pelaksanaannya*. Edisi revisi. Jakarta : Djambatan, 2008.
- Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta : 1973.
- Hutagalung, Arie Sukanti dan Markus Gunawan. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Cetakan Pertama. Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008.
- Hutagalung, Arie Sukanti . *Konsepsi Yang Mendasari Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Indonesia). Depok : 2003.

- . *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Cetakan Pertama, Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005.
- Huda, Ni'matul. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Cetakan Kedua .Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- *Hukum Pemerintahan Daerah*. Cetakan Ketiga. Bandung : Nusa Media, 2012.
- Istanto, F. Sugeng. *Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Indonesia*. Yogyakarta : Karya Putra, 1971.
- Kusuma, R. A. *Lahirnya UUD 1945 : Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidik Oesaha-oesaha Persiapan Kemerdekaan*. Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Lubis, M. Solly. *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alumni, 1974.
- Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945* Jakarta : Sinar Harapan, 1994.
- *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Pusat Studi Hukum FH UII, 2001.
- *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*. Karawang : UNISKA, 1993.
- Martosoewignjo, Sri Sumantri. *Pengantar Perbandingan Antara Hukum Tata Negara*. Jakarta : Rajawali, 1981.
- Mawardi, Arsyad. *Pengawasan dan Keseimbangan Antara DPR dan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan (tinjauan Normatif, Empiris, Historis dan Komprehensif)*. Semarang : raSail Media Grup, 2013.
- Muchsin, et.al. *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*. Cetakan Kedua. Bandung : Refika Aditama, 2010.
- Nurlinda Ida. *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria (Perspektif Hukum)*. Cetakan Pertama. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2009.
- Perangin, Effendi. *Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1994.

- Perlindungan, A.P. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung : Mandar Maju, 1998.
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Cetakan Ketiga. Jakarta Timur : Khalifa, 2007.
- Santoso, Agus. *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013.
- Santoso Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Setyawan Salam, Dharma. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*. Cetakan Pertama. Jakarta : Djambatan, 2003.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta : Liberty, 1993.
- Sudiyat, Iman. *Hukum Adat : Sketsa Asas*. Cetakan Kelima. Yogyakarta : Liberty, 1981.
- Sudjijono, Budi dan Deddy Rudianto. *Manajemen Pemerintah Federal Perspektif Indonesia Masa Depan*. Cetakan Pertama. Jakarta : Citra Mandala Pratama, 2003.
- Supriadi. *Hukum Agraria*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Sutedi Adrian. *Hukum Rumah Susun dan Apartemen*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- SW Sumarjono, Maria. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Cetakan Keenam. Jakarta : Kompas, 2009.
- Wayong, J. *Asas-Asas dan Tujuan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Djambatan, 1975.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- TAP MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Tap MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

TAP MPR RI Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985, Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor; Tambahan Lembaran Negara Nomor tentang Rumah Susun.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor; Tambahan Lembaran Negara Nomor tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor ...; Tambahan Lembaran Negara Nomor ... tentang Wakaf.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725 tentang Penataan Ruang.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor; Tambahan Lembaran Negara Nomor tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor; Tambahan Lembaran Negara Nomor tentang Rumah Susun.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor; Tambahan Lembaran Negara Nomor tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 tentang Pemerintahan Daerah.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor.... tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor.... tentang Pendaftaran Tanah.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor ...; Tambahan Lembaran Negara Nomor tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor; Tambahan Lembaran Negara Nomor tentang Perangkat Daerah.
- Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan.

Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001.

Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Indonesia. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi.

Indonesia. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bantul Nomor 264 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Sebagian Kewenangan di Bidang Pertanahan di Kabupaten Bantul.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.

Keputusan Bupati Bantul Nomor 264 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Sebagian Kewenangan di Bidang Pertanahan di Kabupaten Bantul.

Keputusan Bupati Bantul Nomor 191 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Teknis Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Kegiatan Pendataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Bantul.

C. Website

Albert Morangki, “*Tinjauan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan di Bidang Pertanahan*”, dalam <http://repo.unsrat.ac.id/view/creators/Morangki=3AAlbert=3A=3A.htm>, Akses 25 Juni 2014.

Farid Pratama K, <https://rumahdiskusi.wordpress.com/2011/12/19/konsep-negarara-integralistik-mr-soepomo>, Akses 28 Februari 2015.

Sri Winarni, “Wewenang Pertanahan Pada Era Otonomi Daerah”, dalam <http://journal.lib.unair.ac.id/index.php/YRDK/article/view/569>, Akses 20 Juni 2014.

<http://politik.kompasiana.com/2013/11/08/menyoal-kembali-bentuk-negara-606338.html>, Akses 28 Februari 2015

D. Makalah, Artikel dan Jurnal

Boy Yenda Tamin, *Otonomi Daerah Pasca Revisi UU Nomor 22 Tahun 1999: Tantangan Dalam Mewujudkan Local Accountability*, (Jakarta: Universitas Bung Hatta, 2004), artikel.

Donna Okthalia Setiabudhi, *Kewenangan dan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan dan Penguasaan Tanah*, (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2015), artikel.

Rahmi Elita. “*Tarik Menarik antara Desentralisasi dan Sentralisasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Urusan Pertanahan*”, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009.

Harsono, Boedi. *46 Tahun UUPA, Usaha Penyempurnaan yang Belum Selesai*, Makalah disampaikan pada Pertemuan Tahunan Memperingati Hari Ulang Tahun UUPA, Jakarta, 14 September 2006.